LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

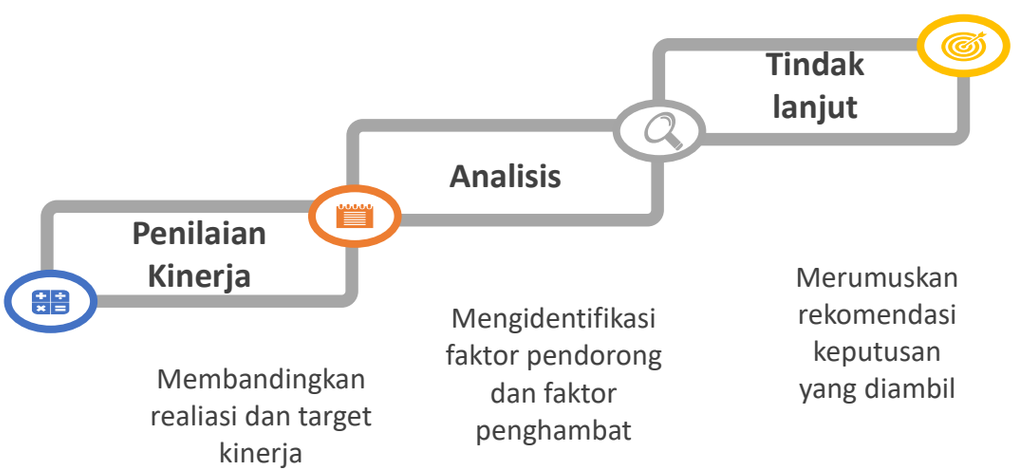
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.

2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

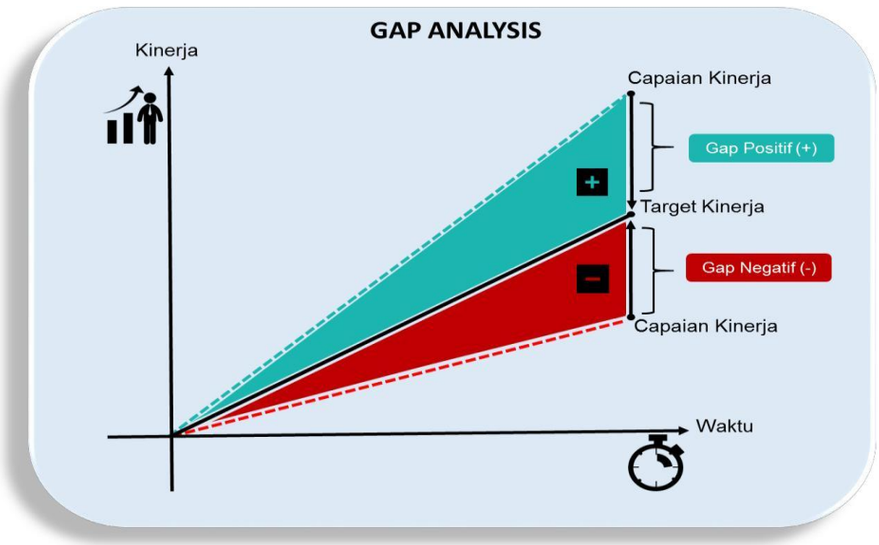
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja

berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



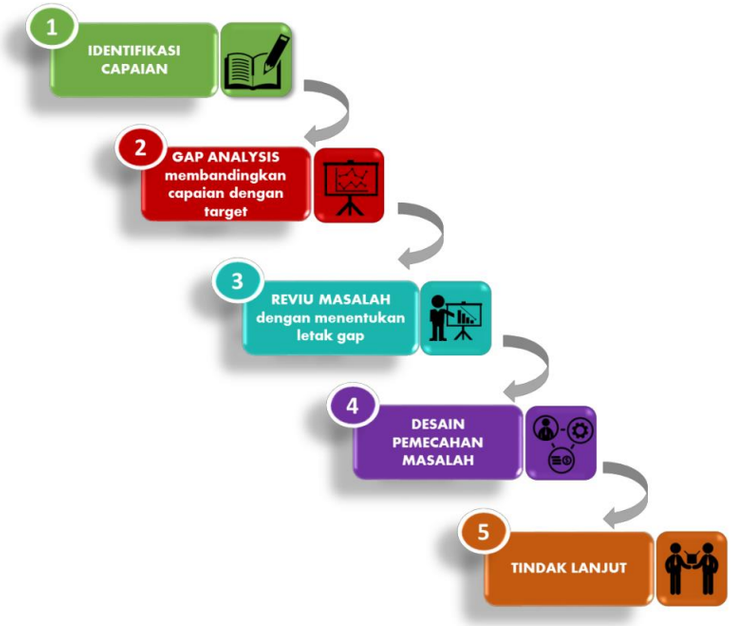
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagainya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit BPK	WTP	100 %	100 %
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standar	100 %	100%	100%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama yaitu Opini atas audi BPK telah tercapai sebesar 100 % dikarenakan tahapan pemeriksaan BPK telah diselesaikan dengan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Capaian indikator kinerja kunci yaitu persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standar tercapai 100 % pada tribulan IV dikarenakan kegiatan dan subkegiatan yang mendukung telah tercapai dengan kategori sangat tinggi.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
1	**Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**		**Keuangan**				**450.866.504.247,51**			**430.710525.653,45**
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP BPKAD**	**82**		**8.384.683.236,14**			**7.212.605.625**
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**59.319.200**	**103%**	**%**	**51.949.600**
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	13.290.000	5	dokumen	10.589.000
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	5.562.000	1	dokumen	5.082.000
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	6.639.000	1	dokumen	5.873.850

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	5.210.000	1	dokumen	4.630.750
		5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	4.833.200	1	dokumen	4.365.000
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	laporan	14.000.000	4	laporan	12.970.000
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	laporan	9.875.000	3	laporan	8.439.000
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**100**	**%**	**6.284.770.000**	**100%**	**%**	**5.439.805.554**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46	orang/ bulan	6.284.770.000	43	orang/ bulan	5.421.810.554
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi danpenyusunan laporankeuangan akhir tahunSKPD	Jumlah laporankeuangan akhir tahunSKPD dan laporanhasil koordinasipenyusunan laporankeuangan akhir tahunSKPD	1	laporan	7.129.000	1	laporan	6.646.000
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17	laporan	11.419.450	17	laporan	11.349.000
		5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**100**	**%**	**9.891.000**	**100%**	**%**	**9.839.000**
		5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	9.891.000	2	laporan	9.839.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**75**	**%**	**202.521.050**	**75%**	**%**	**144.854.901**
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	paket	0	0	paket	-
		5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150	orang	38.143.750	150	orang	19.615.000
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150	orang	167.377.300	150	orang	125.239.901
		5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	**90**	**%**	**309.743.648**	**80%**	**%**	**247.256.904**
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	10.218.892	1	paket	10.170.200

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	paket	3.872.400	1	paket	1.008.300
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1	paket	108.218.816	1	paket	89.931.224
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	17.692.000	1	paket	9.754.852
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	dokumen	4.200.000	3	dokumen	2.520.000
		5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	10	laporan	8.954.240	8	laporan	5.109.458
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	Jumlah laporanPenyelenggaraanrapat koordinasi dankonsultasi SKPD	36	laporan	110.374.000	34	laporan	84.741.000
		5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	200	dokumen	46.213.300	200	dokumen	44.021.870

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		-
		5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan**	**80**	**%**	**313.501.538**	**76**	**%**	**296.440.725**
		5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10	unit	285.587.538	18	unit	268.595.025
		5.02.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	10	unit	27.914.000	11	unit	27.845.700
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**90**	**%**	**727.487.000**	**80%**	**%**	**628.387.187**
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat	3	laporan	4.365.000	3	laporan	1.514.000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	laporan	240.000.000	12	laporan	197.522.979
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	483.122.000	12	laporan	426.890.208
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara**	**84**	**%**	**455.901.350**	**75%**	**%**	**394.071.754**
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	19	unit	138.912.800	18	unit	115.936.344
		5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10	unit	10.788.500	1	unit	1.412.500
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10	unit	100.400.050	10	unit	71.050.150

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	205.800.000	1	unit	205.672.760
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah Sesuai Standar**	**100**	**%**	**441.033.634.961.37**	**100%**	**%**	**422.231.732.809**
		5.02.02.2.01	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH**	**Presentase Dokumen Anggaran Daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu**	**96**	**%**	**1.438.930.088**	**96%**	**%**	**1.244.354.601**
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	dokumen	345.044.428	2	dokumen	285.954.620
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi danPenyusunan PerubahanKUA dan PerubahanPPAS	Jumlah dokumenperubahan KUA danperubahan PPAS yangdisusun	2	dokumen	353.393.816	2	dokumen	290.014.413

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	371.749.200	2	dokumen	316.535.435
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	5	dokumen	368.742.644	5	dokumen	351.850.133
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		0	orang	0	-	orang	-
		5.02.02.2.02	**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah**	**100**	**%**	**529.475.050**	**100%**	**%**	**461.922.561**
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	9000	dokumen	277.851.300	9277	dokumen	263.355.811

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	208	dokumen	88.807.200	208	dokumen	83.997.900
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi fasilitasi asitensi, sinkronisasi, supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.	92	dokumen	48.323.900	92	dokumen	36.581.800
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	dokumen	24.679.000	1	dokumen	9.879.400
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	650	dokumen	14.878.250	650	dokumen	10.539.250

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	dokumen	74.935.400	5	dokumen	57.568.000
		5.02.02.2.03	**KOORDINASI DANPELAKSANAANA KUNTANSI DANPELAPORAN KEUANGANDAERAH**	**Presentase DokumenPertanggungjawabanPelaksanaan APBDYang Disusun**	**100**	**%**	**615.143.300**	**100%**	**%**	**528.632.181**
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	11	laporan	56.833.400	11	laporan	49.699.800
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4	laporan	66.981.500	4	laporan	46.922.104

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	dokumen	455.993.600	2	dokumen	407.373.777
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHPH BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			0	-		-
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	dokumen	14.899.800	2	dokumen	8.676.000
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150	orang	20.435.000	150	orang	15.960.500

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.02.2.04	**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**80**	**%**	**438.381.926.273**	**80%**	**%**	**419.961.628.133**
		5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6	laporan	397.010.746.000	6	laporan	386.801.199.133
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4	laporan	13.274.518.673	4	laporan	5.084.553.000
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota	2	laporan	28.096.661.600	2	laporan	28.075.876.000
		5.02.02.2.05	**Pengelolaan data danimplementasi SistemInformasi PemerintahDaerah lingkupkeuangan daerah**	**Persentase OPD yangmendapatkanpembinaanimplementasi SIPD**	**80**	**%**	**68.160.250**	**80%**	**%**	**35.195.333**
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	100	orang	94.076.000	100	orang	20.873.554

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar**	**100**	**%**	**1.448.186.050**	**100%**	**%**	**1.266.187.219**
		5.02.03.2.01	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Terlaksananya penyusunan dokumen pengelolaan barang milik daerah**	**100**	**%**	**1.448.186.050**	**100%**	**%**	**1.266.187.219**
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	52	dokumen	223.123.000	52	dokumen	212.439.300
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	52	dokumen	35.000.000	52	dokumen	32.936.850
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52	laporan	435.493.000	52	laporan	324.756.043
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	52	laporan	88.914.000	52	laporan	82.726.800
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	laporan	290.117.800	4	laporan	275.519.772

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		
1	2	3	4	5	6			7		
					K		Rp	K		Rp
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	30	laporan	130.295.400	30	laporan	126.804.703
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	26	dokumen	245.040.050	26	dokumen	211.003.751

Analisis capaian kinerja Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dan Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Keuangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Pada capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk seluruh kegiatan rutin dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja SANGAT TINGGI**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Realisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dengan capaian Tinggi karena dokumen telah tersusun sesuai dengan jadwal**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Realisasi Evaluasi kinerja perangkat daerah sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Realisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dengan capaian Tinggi karena dokumen telah tersusun sesuai dengan jadwal**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan dan hitungan yang sesuai kondisi sebenarnya

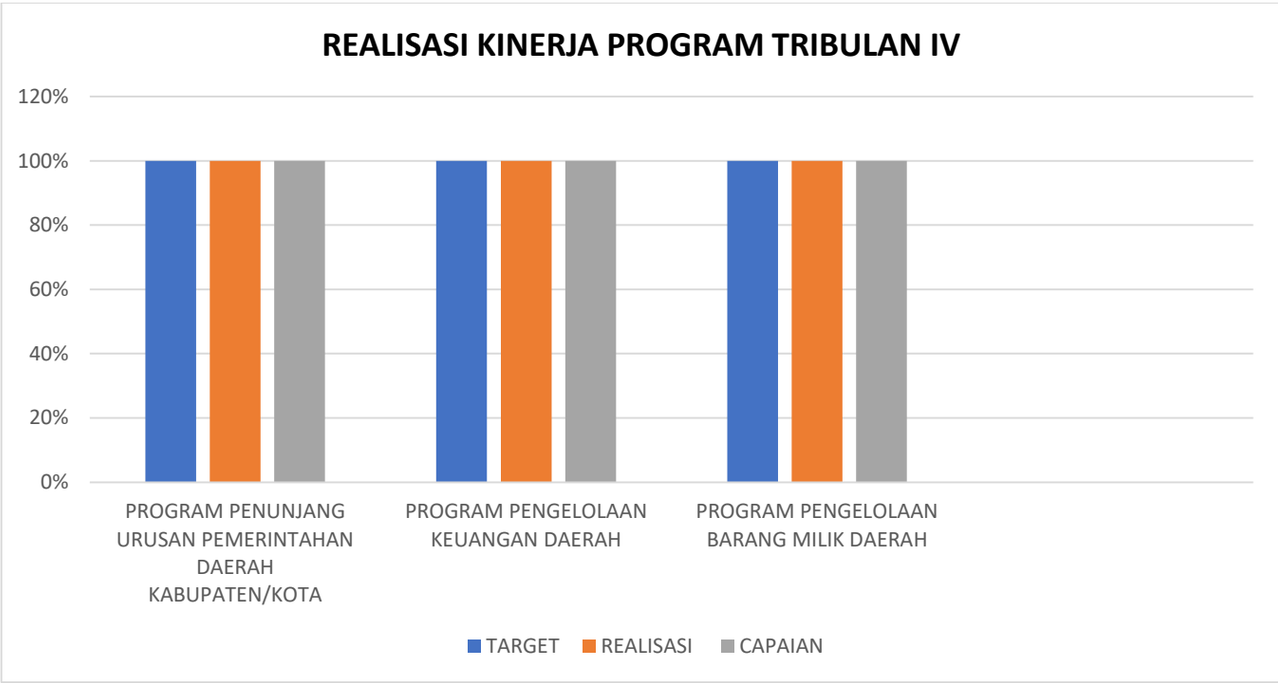
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Koordinasi danpenyusunan laporan keuangan akhir tahunSKPD	Koordinasi danpenyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sudah terlaksana dengan realisasi sesuai dengan target
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Realisasi Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Kriteria Tinggi pada Penilaian Capaian Kinerja**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sudah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Realisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja tinggi**
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi tidak terlaksana sesuai target karena ada efisiensi anggaran
Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan tidak terlaksana sesuai target karena ada efisiensi anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja tinggi**
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sudah terlaksana sesuai dengan jadwal
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah tangga sudah terlaksana sesuai dengan jadwal
Penyediaan bahan logistik	Penyediaan bahan logistic sudah terlaksana sesuai dengan jadwal
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sudah terlaksana
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sudah terlaksana sesuai dengan perencanaannya
Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu sudah terlaksana
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tamu sudah terlaksana
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sudah terlaksana
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Tinggi**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya sudah terlaksana dan melebihi target karena terjadi perubahan anggaran
Pengadaan mebel	Sub kegiatan pengadaan mebel sudah terlaksana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Sedang**
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat sudah terlaksana sesuai dengan jadwal
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sudah telaksana. Dan yang terlaksana hanya pembayaran listrik. Untuk air dan jasa komunikasi dihapuskan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sudah terlaksana
Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Realisasi Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Tinggi**
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sudah terlaksana 18 unit dan 1 unit mobil dilelang
Pemeliharaan mebel	Sub kegiatan Pemeliharaan mebel sudah terlaksana dengan baik. Tahun 2025 pemeliharaan 1 unit sofa
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya sudah terlaksana
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Pada capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja SANGAT TINGGI**
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	**Realisasi Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Tinggi**
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS sudah tersusun sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Bidang Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sudah tersusun sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan Bidang Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen hasil dari sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sudah tersusun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	**Realisasi Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Sedang**
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah hasil Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sudah teralisasi sesuai dengan target
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sudah terealisasi
Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sudah terealisasi sesuai dengan target
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sudah terealisasi
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sudah terealisasi
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Sub kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan sudah terlaksana
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	**Realisasi Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Tinggi**
Rekonsiliasi danVerifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO danBeban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi danVerifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan,Pendapatan-LO dan Beban sudah terealisasi
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan untuk Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sudah terealisasi
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Hasil rancangan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sudah terlaksana

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Koordinasi,Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi,Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah sudah terlaksana
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sudah terlaksana
PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Realisasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Tinggi**
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Untuk sub kegiatan Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan dengan hasil output jumlah laporan sudah terlaksana dan terealisasi sesuai dengan perencanaan
Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Untuk sub kegiatan Pengelolaan dana darurat dan mendesak sudah terlaksana dan sudah terealisasi
Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Sub kegiatab Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota sudah terlaksana dan sudah terealisasi
Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah	**Realisasi Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Tinggi**
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota sudah terlaksana
PROGRAM PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH	**Realisasi Program PengelolaanBarang Milik Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja Sanagt Tinggi**
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Realisasi Kegiatan PengelolaanBarang Milik Daerah dengan kriteria Penilaian Capaian kinerja tinggi**
Penyusunan Standar Harga	Untuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Harga sudah terlaksana sesuai dengan jadwal perencanaan dan sesuai hasil koordinasi dengan 52 OPD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sudah terlaksana dan sesuai hasil koordinasi dengan 52 OPD
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah belum terlaksana
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah sudah terlaksana
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah sudah terlaksana
Pengamanan Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sudah terlaksana
Penilaian Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah sudah terlaksana

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Analisis Capaian Kinerja
1	2
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sudah terlaksana



Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

1. Capaian Output Kegiatan pada Program Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah Tribulan IV rata-rata 100 %, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah **SANGAT TINGGI** dan untuk tahun anggaran berikutnya akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja
2. Capaian Output Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tribulan IV rata-rata 100%, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah **SANGAT Tinggi** dan untuk tahun anggaran berikutnya akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja.
3. Capaian output Sub Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tribulan IV rata-rata 100 %, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah **SANGAT Tinggi** dan untuk

tahun anggaran berikutnya akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja.

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Sinergitas seluruh stakeholder	Belum optimalnya komitmen OPD dalam penyusunann dokumen
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sinergitas seluruh stakeholder	Belum tertibnya pelaporan barang investaris

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
Keuangan		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Faktor pendorong kegiatan ini adalah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan agar tepat waktu dan pelaksanakaan kegiantan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
	bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Faktor pendorong nya adalah sub kegiatan dilaksanakan agar penyusunan tepat waktu dan pelaksanakaan kegiatan di OPD bias berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung dari Bidang-bidang
Administrasi Keuangan Perangkat daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Faktor pendorongnya adalah lancer dan tepat waktu dalam pembuatan SPJ Gaji	Penetapan Anggaran Kas Tidak Tepat
Koordinasi danpenyusunan laporan keuangan akhir tahunSKPD	Faktor pendorongnya adalah koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD tepat waktu	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Faktor pendorongnya sub kegiatan ini disusun dengan tepat waktu dan dipenuhi dengan data dukung yang berkualitas	Terlambatnya penyampaian dokumen pendukung Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dari Bidang-bidang
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Faktor pendorongnya sub kegiatan ini disusun dengan tepat waktu dan dipenuhi dengan data dukung yang berkualitas	Identifikasi BMD terhadap jumlah barang mengalami keterlambatan/kesulitan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah terlaksananya sesuai dengan target perencanaan	Pemahaman pengelola keuangan terkait dengan Peraturan/ketentuan pengelolaan keuangan daerah belum maksimal
Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah terlaksananya sesuai dengan target perencanaan	Pemahaman pengelola keuangan terkait dengan Peraturan/ketentuan pengelolaan keuangan daerah belum maksimal
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Faktor pendorong dari sub kegitaan ini adalah adanya kerusakan pada komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sehingga memerlukan pembaharuan	Jumlah ATK yang tersedia terbatas
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan OPD	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli terbatas
Penyediaan bahan logistik	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik sesuai dengan kebutuhan OPD	Jumlah ATK yang tersedia terbatas
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan OPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia terbatas
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan OPD	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi
Fasilitasi kunjungan tamu	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah telaksananya kunjungan tamu berjalan lancar	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah telaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasu SKPD berjalan lancar	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah berjalan dengan baik	Pencarian Arsip Produk BPKAD kurang optimal
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Faktor pendorong kegiatan ini banyaknya penyedia jasa dan adanya peralatan dan mesin lainnya yang sudah rusak dan segera ditindaklanjuti	Dokumen RKBMD belum dipedomani dalam penyusunan RKA
Pengadaan mebel	Faktor pendorong kegiatan ini banyaknya penyedia jasa dan adanya pengadaan mebel yang sudah rusak dan segera ditindaklanjuti	Dokumen RKBMD belum dipedomani dalam penyusunan RKA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Faktor pendorong kegiatan yaitu tersedianya surat-menyurat	Arsip Surat belum tertata secara optimal
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Faktor pendorong dari sub kegitaan ini adalah proses tagihan dan pembuatan SPJ tagihan listrik lancar	Tidak tersedianya internet, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Faktor pendorong dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan bahan dan alat kebersihan tidak optimal
Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Faktor pendorong sub kegitan ini adalah pajak dan operasional kendaraan dinas berjalan dengan lancar	Kualitas pemakaian kendaraan dinas operasional menurun/rusak
Pemeliharaan mebel	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah mebel terpelihara dengan baik	Kualitas mebel menurun/rusak
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah peralatan dan mesin lainnya terpelihara dengan baik	Kualitas Peralatan dan mesin menurun/rusak
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Faktor pendorong dari sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya terpelihara dengan baik	Kondisi bangunan gedung rmenurun/rusak
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Adanya amanat regulasi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2025; Sinergitas seluruh stakeholder	Waktu penyusunan terbatas bersamaan dengan penugasan yang lain dan data pendukung kurang memadai.
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sinergitas seluruh stakeholder	Waktu penyusunan terbatas bersamaan dengan penugasan yang lain dan data pendukung kurang memadai; Kendala sistem seperti sub kegiatan yang muncul dobel pada SIPD sehingga mempengaruhi angka keseluruhan
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Adanya amanat regulasi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2025; Sinergitas seluruh stakeholder	Waktu penyusunan terbatas bersamaan dengan penugasan yang lain dan data pendukung kurang memadai; Kendala sistem seperti sub kegiatan yang muncul dobel pada SIPD sehingga mempengaruhi angka keseluruhan.
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Mendapat Dana Transfer dari Pusat sehingga perlu dilakukan proses perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; Sinergitas seluruh stakeholder	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan berjalan sehingga fokus dan waktu terbagi.
KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Penerbitan dokumen SP2D sesuai dengan pengajuan SKPD, Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi diselesaikan tepat waktu, Laporan dan rekonsiliasi Dagulir telah diselesaikan secara bertahap.	OPD belum melengkapi permohononan sesuai ketentuan sehingga pelayanan SP2D dan lainnya tidak dapat segera ditindaklanjuti
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Verifikasi anggaran kas SKPD dan Penerbitan SPD sesuai dengan jadwal	OPD belum melengkapi permohononan sesuai ketentuan sehingga pelayanan SP2D dan lainnya tidak dapat segera ditindaklanjuti
Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan dan rekonsiliasi dana transfer sesuai dengan ketentuan dan peraturan	-

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	PKS dengan Bank Jatim terkait SP2D Online masih proses, KKPD masih proses (untuk SKPD yang ada pergantian PA)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi sudah sesuai dan dilaksanakan sesuai jadwal	Data rekon yang disampaikan oleh SKPD ada yang kurang lengkap dan beberapa belum tepat waktu
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan	Penerapan petunjuk teknis (Peraturan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Keputusan dan Surat Edaran) yang kurang dipahami oleh seluruh SKPD
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		
Rekonsiliasi danVerifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO danBeban	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan data keuangan yang telah direkonsiliasi antara SKPD dan PPKD	Kurangnya komitmen sebagian perangkat daerah memperlambat penyelesaian selisih saat proses rekonsiliasi, Dokumen pendukung sering tidak lengkap atau terlambat disampaikan, Permasalahan pada sistem/aplikasi keuangan yang menghambat proses rekonsiliasi
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur kewajiban penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjabaran melalui Peraturan Kepala Daerah.	Batas waktu penyusunan LKPD yang terbatas, Penyusunan laporan masih sangat bergantung pada pendampingan bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, sehingga memperlambat proses konsolidasi, - Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM akuntansi, khususnya pada perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Menurunya perolehan Opini BPK dan keterlambatan penetapan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Koordinasi,Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	-

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan sosialisasi yang memadai diperlukan karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan	Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap SAP, Kebijakan Akuntansi dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan, Tingginya Mutasi/Rotasi pejabat pengelola keuangan menyebabkan pembinaan tidak berkelanjutan
PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan		Penyaluran Bantuan Bantuan Keuangan Tidak Tepat Waktu
Pengelolaan dana darurat dan mendesak		Penyaluran Bantuan Sosial dan BTT Dalam Rangka Penanganan Bencana Tidak Tepat Waktu
Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota		Penyaluran BHPRD Tidak Tepat Waktu
Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah		
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan sosialisasi yang memadai	Terhambatnya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah
PROGRAM PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH		
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Penyusunan Standar Harga	Tingkat inflasi yang terkendali pada periode penyusunan, sehingga selisih antara harga survei dengan harga pada saat pelaksanaan anggaran tidak terlalu jauh.	Sering terjadi keterlambatan pengusulan RKBMD dari SKPD sehingga data yang diusulkan dengan RKA yang disusun tidak sama..
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dukungan dari Sekretaris Daerah dalam menegakkan disiplin penyampaian usulan RKBMD tepat waktu oleh seluruh SKPD.	Sering terjadi keterlambatan pengusulan RKBMD dari SKPD sehingga data yang diusulkan dengan RKA yang disusun tidak sama.
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan barang milik daerah dianggap belum tertib karena masih terdapat Kesalahan Klasifikasi dan Kapitalisasi Aset	Kompetensi Pengurus Barang Perangkat Daerah yang masih kurang memadai (Pengurus Barang tidak memahami Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terkait

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3
		batas minimal **kapitalisasi).**
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penggunaan label aset berbasis digital mempercepat proses rekonsiliasi data antara kondisi fisik di lapangan dengan catatan di sistem aplikasi.	Banyaknya aset lama yang fisiknya sudah tidak ada namun masih tercatat di KIB -
Pengamanan Barang Milik Daerah	Adanya kerja sama yang kuat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sertifikasi tanah atau aset Pemda.	Banyak aset tanah atau bangunan yang tidak memiliki dokumen secara lengkap
Penilaian Barang Milik Daerah	Adanya kerjasama yang baik dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan penilaian aset yang memerlukan keahlian khusus.	belum adanya ASN yang memiliki sertifikasi fungsional Penilai Pemerintah, sehingga harus mengandalkan pihak eksternal seperti KPKNL dan KJPP.
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Adanya kebijakan/ regulasi yang spesifik mengatur prosedur penghapusan dan pemindahtanganan BMD	Adanya kebijakan/ regulasi yang spesifik mengatur prosedur penghapusan dan pemindahtanganan BMD

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Tribulan IV tahun 2025 SANGAT TINGGI , namun masih terdapat hal-hal yang masih dapat ditingkatkan untuk hasil yang lebih optimal. Untuk faktor yang mendorong sedangkan faktor yang menghambatakan menjadi bahan evaluasi sehingga dapat direduksi pada tribulan berikutnya.

IV.2. Tindak Lanjut

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun berikutnya makalangkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis terhadap sub kegiatan yang belum optimal dan tidak efisien;
2. Melakukan sinergi dengan Dinas Terkait terhadap Barang Milik Daerah sebagai efisiensi biaya;
3. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan instransi terkait dalam hal penangganan SIPD yang sering gangguan;
4. Membuat analisis resiko terhadap setiap subkegiatan

Nganjuk, 12 Januari 2025
Kepala BPKAD
Kabupaten Nganjuk



Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001